

**PENGEMBANGAN SDM APARATUR DESA MELALUI
PEMANFAATAN LEARNING MANAGEMENT SYSTEM (LMS) DESA
KUTAI LAMA KECAMATAN ANGGANA KABUPATEN KUTAI
KARTANEGERA PROVINSI KALIMANTAN TIMUR**

Tesis

**Untuk memenuhi sebagian persyaratan Mencapai Derajat Magister
Program Studi Manajemen**



Disusun Oleh :

SUARDI

NIM. 20402400059

**UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG (UNISSULA)
PROGRAM MAGISTER MANAJEMEN
FAKULTAS EKONOMI
SEMARANG
2025**

HALAMAN PENGESAHAN

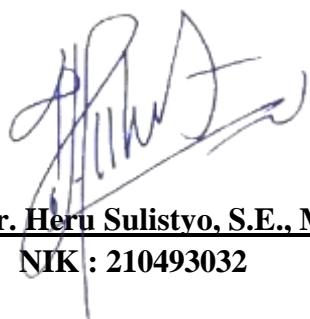
TESIS

**PENGEMBANGAN SDM APARATUR DESA MELALUI
PEMANFAATAN LEARNING MANAGEMENT SYSTEM (LMS) DESA
KUTAI LAMA KECAMATAN ANGGANA KABUPATEN KUTAI
KARTANEGARA PROVINSI KALIMANTAN TIMUR**



Semarang, 08 Juli 2025

Pembimbing,



Prof. Dr. Heru Sulistyо, S.E., M.Si.
NIK : 210493032

LEMBAR PERSETUJUAN TESIS

PENGEMBANGAN SDM APARATUR DESA MELALUI PEMANFAATAN LEARNING MANAGEMENT SYSTEM (LMS) DESA KUTAI LAMA KECAMATAN ANGGANA KABUPATEN KUTAI KARTANEGERA PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

Disusun Oleh:

Suardi

NIM. 20402400059

Telah dipertahankan di depan penguji pada tanggal, 25 Juli 2025

Susunan Dewan Penguji

Pembimbing

Penguji I

Prof. Dr. Heru Sulistyo, SE, MSi

NIK. 210493032

Prof. Dr. Ibnu Khajar, SE, MSi

NIK. 210491028

Penguji II

Dr. Budhi Cahyono, SE, Msi

NIK. 210492030

Tesis ini telah diterima sebagai salah satu persyaratan
untuk memperoleh Gelar Magister Manajemen

Tanggal, 25 Juli 2025

Ketua Program Pascasarjana

Prof. Dr. Ibnu Khajar, SE, MSi

NIK. 210491028

PERNYATAAN KEASLIAN TESIS

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : **Suardi**
NIM : 20402400059
Program Studi : Magister Manajemen
Fakultas : Fakultas Ekonomi
Universitas : Universitas Islam Sultan Agung

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa tesis yang berjudul “Pengembangan SDM Aparatur Desa Melalui Pemanfaatan Learning Management System (LMS) Desa Kutai Lama Kecamatan Anggana Kabupaten Kutai Kartanegara Provinsi Kalimantan Timur” merupakan karya peneliti sendiri dan tidak ada unsur plagiarism dengan cara yang tidak sesuai etika atau tradisi keilmuan. Peneliti siap menerima sanksi apabila di kemudian hari ditemukan pelanggaran etika akademik dalam laporan penelitian ini.

Semarang, 25 Juli 2025

Pembimbing

Yang Menyatakan,

Prof. Dr. Heru Sulistyo, SE, MSi
NIK. 210493032

Suardi
NIM. 20402400059

LEMBAR PERNYATAAN PUBLIKASI ILMIAH

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : **Suardi**
NIM : 20402400059
Program Studi : Magister Manajemen
Fakultas : Fakultas Ekonomi
Universitas : Universitas Islam Sultan Agung

Dengan ini menyerahkan karya ilmiah berupa tesis dengan judul:

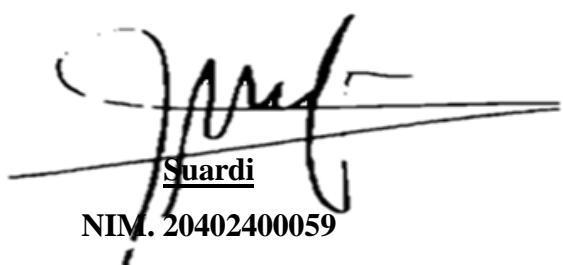
**PENGEMBANGAN SDM APARATUR DESA MELALUI
PEMANFAATAN LEARNING MANAGEMENT SYSTEM (LMS) DESA
KUTAI LAMA KECAMATAN ANGGANA KABUPATEN KUTAI
KARTANEGARA PROVINSI KALIMANTAN TIMUR**

Dan menyetujuinya menjadi hak milik Fakultas Ekonomi Universitas Islam Sultan Agung serta memberikan Hak Bebas Royalti Non-ekslusif untuk disimpan, dialihmediakan, dikelola dalam pangkalan data, dan dipublikasikannya di internet atau media lain untuk kepentingan akademis selama tetap mencantumkan nama penulis sebagai pemilik Hak Cipta.

Pernyataan ini saya buat dengan sungguh – sungguh. Apabila dikemudian hari terbukti ada pelanggaran Hak Cipta/Plagiarisme dalam karya ilmiah ini, maka segala bentuk tuntutan hukum yang timbul akan saya tanggung secara pribadi tanpa melibatkan pihak Fakultas Ekonomi Universitas Islam Sultan Agung.

Semarang, 25 Juli 2025

Yang membuat pernyataan,



Suardi
NIM. 20402400059

ABSTRAK

Suardi, 2025, Transformasi Digital Dalam Pengembangan Sdm Aparatur Desa Melalui Pemanfaatan Learning Management System (Lms) Desa Kutai Lama Kecamatan Anggana Kabupaten Kutaikartanegara. Tesis di bimbing oleh Prof. Dr. Heru Sulistyo, S.E., M.Si Transformasi digital telah menjadi kebutuhan mendesak dalam pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM) di berbagai sektor, termasuk aparatur desa. Penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi pemanfaatan Learning Management System (LMS) dalam meningkatkan kompetensi aparatur Desa Kutai Lama, Kecamatan Anggana, Kabupaten Kutai Kartanegara, Provinsi Kalimantan Timur. Melalui penerapan LMS, diharapkan proses pembelajaran dapat dilakukan secara lebih efektif dan efisien, memungkinkan aparatur desa untuk mengakses materi pelatihan secara mandiri dan fleksibel. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif dengan pengumpulan data melalui wawancara, observasi, dan studi dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penggunaan LMS tidak hanya meningkatkan pengetahuan dan keterampilan aparatur desa, tetapi juga mendorong kolaborasi dan interaksi antar peserta. Selain itu, tantangan dalam implementasi LMS, seperti keterbatasan akses internet dan pemahaman teknologi, juga diidentifikasi. Penelitian ini merekomendasikan perlunya dukungan infrastruktur dan pelatihan tambahan untuk memaksimalkan manfaat LMS dalam pengembangan SDM aparatur desa.

Kata kunci: *Transformasi digital, SDM, Aparatur Desa, Learning Management System, Desa Kutai Lama.*

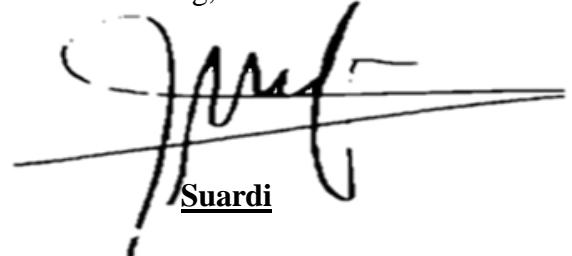
KATA PENGANTAR

Segala puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT, karena hanya perkenan dan RidhoNya, penulis dapat menyelesaikan tesis sesuai dengan yang ditargetkan. Selama proses pembuatan tesis ini, banyak dukungan, bantuan dan bimbingan yang diterima penulis dari berbagai pihak. Untuk itu, dalam kesempatan ini izinkan penulis mengucapkan terimakasih kepada:

1. Prof. Dr. Heru Sulistyo, S.E., M.Si. sebagai Dekan Fakultas Ekonomi Unissula sekaligus sebagai dosen pembimbing yang telah membimbing dengan sangat baik, memberikan arahan, saran dan masukan dalam menyusun dan menyelesaikan usulan penelitian ini.
1. Prof. Dr. Ibnu Khair, S.E.,M.Si sebagai Ketua Program Studi Magister Manajemen Fakultas Ekonomi Unissula.
2. Orang tua, Saudara, Istri dan Anak anak tercinta yang selalu mendukung dan memberikan doa terbaiknya.
3. Serta semua pihak yang telah membantu dan memudahkan dalam menyelesaikan usulan penelitian ini, yang tidak bisa penulis sebut satu per satu.

Semoga apa yang telah diberikan tercatat sebagai amal sholeh dan dibalas dengan kebaikan yang berlipat oleh Allah SWT. Akhir kata penulis berharap semoga usulan penelitian ini dapat dilaksanakan, memberikan manfaat bagi perkembangan ilmu pengetahuan.

Semarang, 25 Juli 2025



Suardi

DAFTAR ISI

PENGEMBANGAN SDM APARATUR DESA MELALUI PEMANFAATAN LEARNING MANAGEMENT SYSTEM (LMS) DESA KUTAI LAMA KECAMATAN ANGGANA KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA PROVINSI KALIMANTAN TIMUR.....	i
HALAMAN PENGESAHAN	i
LEMBAR PERSETUJUAN TESIS.....	ii
PERNYATAAN KEASLIAN TESIS.....	iii
LEMBAR PERNYATAAN PUBLIKASI ILMIAH.....	iv
ABSTRAK.....	v
KATA PENGANTAR	vi
DAFTAR ISI.....	vii
BAB 1 PENDAHULUAN.....	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Rumusan Masalah.....	6
1.3. Tujuan Penelitian	7
1.4. Manfaat Penelitian	8
1.5. Ruang Lingkup Penelitian	10
1.6. Batasan Obyek Penelitian	10
BAB 2 TINJAUAN PUSTAKA DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS.....	12
2.1. Alur Berpikir.....	12
2.1.1 Transformasi Digital dalam Pemerintahan Desa.....	13
2.1.2. Pengembangan SDM Aparatur Desa	14
2.1.3. Learning Management System (LMS) sebagai Media Pelatihan.....	15
2.2. Teori Konstruktivisme	16
2.2.1. Prinsip Konstruktivisme dalam LMS.....	16
2.2.2. Implikasi LMS bagi SDM Aparatur Desa.....	17

2.2.3. Teori Pembelajaran Sosial (Social Learning Theory).....	17
2.2.4. Teori Adopsi Teknologi (Technology Acceptance Model)	18
2.2.5. Teori Andragogi	20
2.2.6. Model Pembelajaran Daring dan Blended Learning.....	21
2.2.7. Technology Acceptance Model (TAM)	21
2.2.8. E-learning Adoption Model – Sun et al. (2016).....	23
2.2.9. Blended Learning Theory – Garrison & Vaughan (2008)	24
2.2.10. Diffusion of Innovation Theory – Rogers (2003)	25
2.2.11. Teori Strategi Pembelajaran	26
2.2.12. Tantangan Implementasi LMS di Desa Terpencil	26
2.3. Faktor Pendukung Transformasi Digital di Desa	27
2.4. Faktor Penghambat Transformasi Digital di Desa.....	29
2.5. Karangka Pikir	31
BAB 3 METODE PENELITIAN.....	32
3.1. Desain Penelitian	32
3.2. Populasi dan Sampel.....	32
3.3. Instrumen Penelitian	33
3.4. Prosedur Penelitian	33
3.5. Teknik Pengumpulan Data	34
3.6. Teknik Analisis Data	35
A. Analisis Data Kualitatif	35
B. Analisis Data Kuantitatif	35
C. Analisis SWOT.....	35
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN.....	38
A. Hasil Penelitian	38
B. Hasil wawancara	38
1. Hasil Wawancara Sebelum Pemanfaatan Learning Management System (LMS).....	38
2. Hasil Wawancara pada saat proses pelatihan Learning Management System (LMS).....	43
3. Hasil Wawancara setelah pelatihan Learning Management System (LMS)	

.....	47
BAB V PENUTUP	50
A. KESIMPULAN	50
B. SARAN	50
DAFTAR PUSTAKA	54
KUISIONER/ PEDOMAN WAWANCARA	57
A. KUISIONER UNTUK PESERTA PELATIHAN (APARATUR DESA)....	57
B. KUISIONER UNTUK PELATIH / FASILITATOR LMS.....	58
C. KUISIONER UNTUK PERANGKAT DESA NON-PESERTA PEMERINTAH DESA.....	59





BAB 1

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa telah mengubah paradigma dalam tata kelola desa di Indonesia. UU ini memberikan peran yang lebih luas kepada pemerintah desa dalam mengelola urusan pemerintahan dan pembangunan desa, sembari tetap berada dalam sistem pemerintahan nasional. Desa kini memiliki dua wajah: sebagai entitas mandiri (*self-governing community*) dan sebagai bagian dari sistem pemerintahan pusat (*local state government*). Perubahan ini menuntut peningkatan kapasitas aparatur desa agar mereka dapat menjalankan tugasnya secara efektif. Namun, dengan jumlah desa yang sangat banyak dan tersebar di seluruh Indonesia, tantangan dalam memberikan pelatihan dan pengembangan kapasitas aparatur desa menjadi semakin kompleks. Tuntutan penggunaan anggaran desa yang lebih transparan dan efisien, serta regulasi yang semakin ketat, membuat aparatur desa harus memiliki kompetensi tinggi dalam bidang administrasi, keuangan, dan hukum pemerintahan desa. Untuk menjawab tantangan ini, pemerintah melalui Direktorat Jenderal Bina Pemerintahan Desa telah menginisiasi kebijakan pelatihan berbasis digital sejak tahun 2019. Pelatihan ini menggunakan platform *Learning Management System* (LMS) untuk memberikan akses pelatihan yang lebih fleksibel, efisien, dan menjangkau lebih banyak aparatur desa dibandingkan dengan metode pelatihan tatap muka.

Namun, dalam implementasinya, pelatihan berbasis LMS juga menghadapi berbagai kendala, seperti aksesibilitas teknologi, kesiapan sumber daya manusia di

tingkat desa, serta efektivitas metode pembelajaran daring dibandingkan dengan metode konvensional. Oleh karena itu, diperlukan evaluasi menyeluruh terhadap efektivitas pelatihan berbasis digital ini guna memastikan bahwa kebijakan yang diterapkan benar-benar berdampak pada peningkatan kapasitas aparatur desa.

Menurut data Kementerian Dalam Negeri tahun 2022, terdapat lebih dari 74.000 desa di seluruh Indonesia yang harus mengadopsi sistem pemerintahan yang semakin kompleks dan berbasis digital (Kemendagri, 2022). Dalam laporan yang sama, disebutkan bahwa lebih dari 60% aparatur desa masih memiliki keterbatasan dalam penggunaan teknologi digital untuk kepentingan administrasi pemerintahan desa.

Studi dari BPS (2021) menunjukkan bahwa sebanyak 45% desa di Indonesia masih mengalami kendala dalam akses internet yang stabil, yang menjadi salah satu hambatan utama dalam implementasi pelatihan berbasis digital. Hal ini sejalan dengan penelitian dari Setiawan et al. (2020), yang menemukan bahwa efektivitas pelatihan berbasis LMS sangat bergantung pada kesiapan infrastruktur teknologi dan literasi digital peserta pelatihan.

Lebih lanjut, menurut laporan Bank Dunia (2021), model pelatihan daring berbasis LMS dapat meningkatkan efisiensi hingga 50% dibandingkan dengan pelatihan tatap muka dalam hal biaya dan jangkauan peserta. Namun, tingkat keberhasilan pelatihan daring ini masih dipengaruhi oleh kualitas materi yang disampaikan dan tingkat interaksi antara peserta dengan instruktur (Yulianto et al., 2022). Oleh karena itu, meskipun pelatihan berbasis digital menjanjikan efisiensi

yang tinggi, efektivitasnya dalam meningkatkan kapasitas aparatur desa masih menjadi tantangan yang perlu dikaji lebih lanjut.

Sejumlah teori dan penelitian telah mengkaji efektivitas pelatihan berbasis digital dalam meningkatkan kompetensi sumber daya manusia di sektor pemerintahan. Menurut teori *E-learning Adoption Model* (Sun et al., 2016), keberhasilan pelatihan daring sangat bergantung pada faktor aksesibilitas, motivasi peserta, dan dukungan organisasi. Dalam konteks pemerintahan desa, model ini dapat digunakan untuk mengevaluasi kesiapan aparatur desa dalam mengadopsi pelatihan berbasis LMS.

Penelitian oleh Rochman et al. (2019) menemukan bahwa kombinasi pelatihan daring dan tatap muka (*blended learning*) lebih efektif dibandingkan dengan metode pelatihan daring sepenuhnya. Hal ini dikarenakan adanya kebutuhan interaksi langsung untuk memahami aspek teknis dari tata kelola pemerintahan desa, seperti pengelolaan keuangan desa dan administrasi pemerintahan.

Selain itu, teori *Technology Acceptance Model (TAM)* yang dikembangkan oleh Davis (1989) juga relevan dalam mengkaji penerimaan teknologi dalam pelatihan aparatur desa. Studi terbaru oleh Prasetyo & Nugroho (2021) menunjukkan bahwa persepsi kemudahan penggunaan (*perceived ease of use*) dan manfaat (*perceived usefulness*) dari platform LMS berpengaruh signifikan terhadap tingkat partisipasi aparatur desa dalam pelatihan daring.

Penelitian oleh Kurniawan et al. (2020) juga menegaskan bahwa efektivitas pelatihan daring di sektor pemerintahan sangat bergantung pada kualitas konten,

interaktivitas, serta adanya dukungan teknis bagi peserta. Oleh karena itu, meskipun model pelatihan berbasis digital memiliki banyak keunggulan, tantangan dalam implementasinya tetap harus diperhatikan, terutama dalam konteks pemerintahan desa yang memiliki keterbatasan infrastruktur dan literasi digital yang bervariasi. Dengan demikian, penelitian ini akan mengkaji lebih lanjut bagaimana efektivitas pelatihan berbasis LMS dalam meningkatkan kapasitas aparatur desa, serta faktor-faktor yang mendukung dan menghambat keberhasilannya dalam konteks pemerintahan desa di Indonesia.

Desa Kutai Lama, Kecamatan Anggana, Kabupaten Kutai Kartanegara, proses transformasi digital ini menjadi tantangan tersendiri. Desa yang terletak di daerah pedesaan dengan infrastruktur yang terbatas harus menghadapi tuntutan untuk mengelola anggaran desa secara lebih transparan dan efisien. Aparatur desa diharapkan memiliki kompetensi tinggi dalam bidang administrasi, keuangan, dan hukum pemerintahan desa, yang memerlukan peningkatan kemampuan melalui pelatihan. Namun, karena letak geografis yang terpencil dan keterbatasan akses terhadap fasilitas pelatihan konvensional, solusi pelatihan berbasis digital menjadi pilihan yang tepat.

Sejak tahun 2019, pemerintah melalui Direktorat Jenderal Bina Pemerintahan Desa telah menginisiasi kebijakan pelatihan berbasis digital menggunakan Learning Management System (LMS) untuk memberikan akses yang lebih fleksibel dan efisien. Pelatihan ini dirancang untuk menjangkau lebih banyak aparatur desa, termasuk yang berada di wilayah yang sulit dijangkau seperti Desa Kutai Lama. Namun, meskipun LMS menjanjikan berbagai kemudahan,

implementasi pelatihan berbasis digital di desa ini menghadapi berbagai kendala, seperti aksesibilitas teknologi yang terbatas, kurangnya pemahaman teknologi di kalangan aparatur desa, serta efektivitas metode pembelajaran daring dibandingkan dengan metode pelatihan tatap muka. Oleh karena itu, penelitian ini diperlukan untuk mengevaluasi efektivitas pelatihan berbasis LMS di Desa Kutai Lama, Kecamatan Anggana, serta mengidentifikasi faktor-faktor yang mendukung dan menghambat keberhasilan implementasi kebijakan ini.

Saat ini, pemerintah desa di Indonesia menghadapi tantangan dalam meningkatkan kapasitas aparatur desa guna menjalankan peran dan fungsinya sesuai dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Dengan kewenangan yang semakin luas, aparatur desa dituntut memiliki kompetensi yang memadai dalam pengelolaan administrasi, keuangan, dan pembangunan desa yang transparan serta akuntabel. Namun, realitas di lapangan menunjukkan bahwa masih banyak aparatur desa yang belum memiliki keterampilan yang cukup dalam tata kelola pemerintahan berbasis digital.

Menurut data Kementerian Dalam Negeri (2022), lebih dari 60% aparatur desa mengalami kesulitan dalam menggunakan teknologi digital untuk keperluan administrasi dan pengelolaan keuangan desa. Tantangan lainnya adalah keterbatasan akses internet di daerah terpencil, yang menghambat efektivitas pelatihan berbasis digital. Selain itu, penelitian oleh Setiawan et al. (2021) menunjukkan bahwa tingkat literasi digital aparatur desa masih rendah, sehingga metode pembelajaran berbasis *Learning Management System* (LMS) belum dapat dioptimalkan secara maksimal.

Kondisi ini diperparah dengan kendala geografis Indonesia yang terdiri dari ribuan pulau dengan aksesibilitas yang berbeda-beda, sehingga pelatihan tatap muka bagi seluruh aparatur desa menjadi tidak efisien dari segi biaya dan waktu. Meskipun telah ada inisiatif pelatihan berbasis digital sejak 2019, efektivitas program ini masih belum terukur dengan baik, terutama dalam meningkatkan kompetensi dan kualitas pelayanan aparatur desa kepada masyarakat.

Untuk mengatasi permasalahan ini, strategi utama yang dapat diterapkan adalah optimalisasi sistem pelatihan berbasis digital menggunakan platform LMS yang lebih adaptif dan inklusif. Dengan menerapkan strategi ini, diharapkan pelatihan berbasis digital dapat menjadi solusi yang efektif untuk meningkatkan kapasitas aparatur desa, sehingga mereka dapat menjalankan tugas dan tanggung jawabnya secara optimal sesuai dengan amanat Undang-Undang Desa.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan fenomena gap, masalah penelitiannya adalah Bagaimana mengoptimalkan transformasi digital dalam pengembangan SDM aparatur desa Adapun rumusan masalah yang dapat diidentifikasi adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana efektivitas pelatihan berbasis Learning Management System (LMS) saat ini dalam meningkatkan kapasitas aparatur desa di Desa Kutai Lama, Kecamatan Anggana, Kabupaten Kutai Kartanegara?
2. Apa saja faktor-faktor yang mendukung dan menghambat implementasi pelatihan berbasis LMS di Desa Kutai Lama, Kecamatan Anggana?

3. Bagaimana perbandingan efektivitas antara pelatihan berbasis LMS dan metode pelatihan konvensional (tatap muka) dalam meningkatkan kapasitas aparatur desa di Desa Kutai Lama?
4. Apa dampak dari keterbatasan infrastruktur dan teknologi terhadap efektivitas pelatihan berbasis LMS di Desa Kutai Lama?
5. Bagaimana kebijakan pelatihan berbasis LMS dapat disesuaikan untuk meningkatkan efektivitasnya di wilayah desa terpencil seperti Desa Kutai Lama?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan Rumusan masalah diatas, adapun tujuan penelitian yang dapat diidentifikasi adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui efektivitas pelatihan berbasis Learning Management System (LMS) saat ini dalam meningkatkan kapasitas aparatur desa di Desa Kutai Lama, Kecamatan Anggana, Kabupaten Kutai Kartanegara.
2. Untuk mengetahui faktor-faktor yang mendukung dan menghambat implementasi pelatihan berbasis LMS di Desa Kutai Lama, Kecamatan Anggana.
3. Untuk Mengetahui perbandingan efektivitas antara pelatihan berbasis LMS dan metode pelatihan konvensional (tatap muka) dalam meningkatkan kapasitas aparatur desa di Desa Kutai Lama..
4. Untuk mengetahui dampak dari keterbatasan infrastruktur dan teknologi terhadap efektivitas pelatihan berbasis LMS di Desa Kutai Lama.

5. Untuk Mengetahui bagaimana kebijakan pelatihan berbasis LMS dapat disesuaikan untuk meningkatkan efektivitasnya di wilayah desa terpencil seperti Desa Kutai Lama

1.4 Manfaat Penelitian

1.4.1. Manfaat yang Relevan dengan Objek Penelitian

Penelitian ini memiliki manfaat praktis yang signifikan dalam mendukung pengembangan kapasitas aparatur desa melalui pelatihan berbasis *Learning Management System* (LMS).

Pertama, hasil penelitian ini dapat menjadi dasar bagi pemerintah, khususnya Direktorat Jenderal Bina Pemerintahan Desa, dalam merumuskan kebijakan pelatihan yang lebih efektif dan berbasis bukti (*evidence-based policy*).

Kedua, penelitian ini akan memberikan rekomendasi terkait strategi peningkatan literasi digital aparatur desa agar mereka lebih siap dalam mengadopsi teknologi pembelajaran daring.

Ketiga, dengan adanya analisis mengenai tantangan dan solusi dalam implementasi pelatihan berbasis LMS, penelitian ini dapat membantu dalam pengembangan platform LMS yang lebih inklusif dan sesuai dengan kebutuhan aparatur desa di berbagai daerah.

Keempat, penelitian ini akan memberikan wawasan kepada lembaga pelatihan terkait, baik pemerintah maupun swasta, dalam menyusun modul pelatihan yang lebih aplikatif dan kontekstual, sehingga dapat meningkatkan efektivitas pelatihan berbasis digital.

Selain itu, manfaat praktis lainnya adalah meningkatkan kualitas pelayanan publik di tingkat desa. Dengan meningkatnya kompetensi aparatur desa, diharapkan pengelolaan administrasi pemerintahan desa, pengelolaan keuangan, serta pelayanan kepada masyarakat dapat berjalan lebih transparan, akuntabel, dan efisien. Dengan demikian, penelitian ini dapat menjadi salah satu langkah strategis dalam mendukung implementasi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa serta kebijakan pengembangan kapasitas aparatur desa yang dicanangkan oleh pemerintah.

1.4.2. Manfaat Akademis dan Kontribusi terhadap Teori yang Digunakan

Secara akademis, penelitian ini memberikan kontribusi terhadap pengembangan teori dalam bidang pemerintahan desa dan teknologi pembelajaran daring. Pertama, penelitian ini akan memperkaya kajian dalam ranah *Technology Acceptance Model (TAM)* dengan memberikan perspektif baru tentang bagaimana aparatur desa, sebagai bagian dari sistem pemerintahan, menerima dan mengadopsi teknologi LMS dalam pelatihan mereka. Dengan menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan atau hambatan dalam penggunaan LMS, penelitian ini dapat menguji relevansi model TAM dalam konteks pembelajaran digital di pemerintahan desa.

Kedua, penelitian ini juga memberikan kontribusi terhadap *E-learning Adoption Model* dengan mengeksplorasi faktor aksesibilitas, literasi digital, dan dukungan kebijakan dalam menentukan efektivitas pelatihan berbasis LMS di sektor pemerintahan. Dengan adanya data empiris dari penelitian ini, model

tersebut dapat dikembangkan lebih lanjut untuk mencerminkan kondisi spesifik dalam lingkungan pemerintahan desa yang memiliki tantangan tersendiri.

Ketiga, penelitian ini dapat menjadi referensi bagi akademisi dalam studi mengenai kebijakan publik, pemerintahan desa, dan transformasi digital di sektor pelayanan publik. Dengan mengkaji efektivitas kebijakan pelatihan berbasis digital dari perspektif empiris, penelitian ini memberikan landasan bagi penelitian selanjutnya yang berfokus pada optimalisasi pelatihan aparatur desa dengan metode pembelajaran yang lebih inovatif dan adaptif.

Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya memiliki implikasi praktis bagi aparatur desa dan pemerintah, tetapi juga berkontribusi terhadap pengembangan teori dalam studi pemerintahan, teknologi pembelajaran, dan kebijakan publik berbasis digital.

1.5 Ruang Lingkup Penelitian

Penelitian ini memiliki ruang lingkup yang terfokus pada efektivitas pelatihan berbasis *Learning Management System* (LMS) dalam meningkatkan kapasitas aparatur desa di Indonesia. Untuk memastikan hasil penelitian yang lebih spesifik dan aplikatif, penelitian ini memiliki beberapa batasan berikut:

1.6 Batasan Obyek Penelitian

Penelitian ini hanya berfokus pada aparatur desa sebagai subjek utama, yang mencakup kepala desa, perangkat desa, dan staf pemerintahan desa yang berpartisipasi dalam program pelatihan berbasis LMS. Fokus penelitian adalah

bagaimana mereka menerima, mengadopsi, dan merespons metode pelatihan digital serta bagaimana pelatihan tersebut berdampak pada peningkatan kapasitas mereka dalam menjalankan tugas pemerintahan desa.

a. Batasan Geografis

Studi ini tidak mencakup seluruh desa di Indonesia, melainkan hanya beberapa desa yang telah menjalankan atau sedang mengimplementasikan pelatihan berbasis LMS, baik yang diselenggarakan oleh Direktorat Jenderal Bina Pemerintahan Desa maupun pihak lain yang bekerja sama dengan pemerintah. Pemilihan lokasi penelitian didasarkan pada faktor ketersediaan infrastruktur digital, aksesibilitas internet, dan kesiapan sumber daya manusia desa dalam mengadopsi teknologi pembelajaran daring.

b. Batasan Metodologi

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dan kuantitatif (*mixed methods*), dengan metode survei dan wawancara kepada aparatur desa yang telah mengikuti pelatihan LMS. Selain itu, penelitian ini juga akan menganalisis data sekunder dari laporan pemerintah, studi akademik, dan hasil evaluasi program pelatihan digital yang telah dilakukan sebelumnya.

c. Batasan Waktu

Penelitian ini akan berfokus pada periode implementasi kebijakan pelatihan berbasis LMS sejak tahun 2019 hingga tahun penelitian dilakukan. Hal ini bertujuan untuk menilai perkembangan, tantangan, dan efektivitas kebijakan dalam kurun waktu tertentu yang relevan dengan kebijakan pengembangan kapasitas aparatur desa berbasis digital.

BAB 2

TINJAUAN PUSTAKA DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS

2.1 Alur Berpikir

Kajian teori memiliki peranan penting dalam membantu peneliti memahami permasalahan yang diangkat serta memberikan solusi berdasarkan temuan dan konsep yang telah dikembangkan dalam penelitian terdahulu. Dalam konteks penelitian ini, efektivitas pelatihan berbasis *Learning Management System* (LMS) bagi aparatur desa dikaji berdasarkan berbagai teori yang berkaitan dengan adopsi teknologi, efektivitas pelatihan daring, serta strategi peningkatan kompetensi dalam sektor pemerintahan desa.

Sebagaimana dikemukakan dalam **BAB 1**, permasalahan utama yang dihadapi adalah masih rendahnya literasi digital aparatur desa, keterbatasan infrastruktur teknologi, serta belum optimalnya efektivitas pelatihan berbasis LMS dalam meningkatkan kapasitas aparatur desa. Oleh karena itu, kajian teori dalam penelitian ini akan mengarah pada tiga aspek utama:

- 1. Teori adopsi teknologi** – Untuk memahami faktor-faktor yang memengaruhi penerimaan dan penggunaan LMS oleh aparatur desa.
- 2. Teori efektivitas pelatihan daring** – Untuk menganalisis sejauh mana LMS dapat meningkatkan kompetensi aparatur desa dibandingkan dengan metode pelatihan konvensional.
- 3. Teori blended learning** – Untuk mengeksplorasi kemungkinan kombinasi pelatihan daring dan tatap muka guna meningkatkan efektivitas pembelajaran bagi aparatur desa.

Berdasarkan ketiga aspek tersebut, penelitian ini akan menggunakan beberapa teori utama yang telah dikembangkan dalam literatur akademik. Kajian ini juga akan menghubungkan penelitian sebelumnya dengan konteks pemerintahan desa di Indonesia, sehingga dapat memberikan pemahaman yang lebih mendalam mengenai tantangan dan peluang dalam implementasi pelatihan berbasis digital.

2.1.1 Transformasi Digital dalam Pemerintahan Desa

Transformasi digital dalam pemerintahan desa mengacu pada penerapan teknologi digital untuk meningkatkan efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas dalam pengelolaan pemerintahan desa. Transformasi ini tidak hanya melibatkan penggunaan teknologi untuk menyelesaikan tugas administratif, tetapi juga mencakup perubahan paradigma dalam cara aparatur desa menjalankan tugasnya.

Menurut **Hernandez & Wong (2020)**, transformasi digital dapat meningkatkan layanan publik dan efektivitas pemerintahan dengan memanfaatkan teknologi digital, khususnya dalam pengelolaan data dan interaksi antara pemerintah dan masyarakat.

Konsep transformasi digital di pemerintahan desa juga melibatkan pemanfaatan platform digital untuk meningkatkan transparansi dan partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan. **Sahin & Ibrahim (2021)** menambahkan bahwa penerapan teknologi dalam pemerintahan desa tidak hanya meningkatkan kualitas pelayanan, tetapi juga mempercepat pengambilan keputusan dengan meningkatkan komunikasi antar instansi pemerintahan dan warga desa. Oleh karena itu, pemerintahan desa perlu menyiapkan aparatur yang siap

menghadapi perubahan teknologi agar mampu mengelola perubahan ini secara efektif.

2.1.2. Pengembangan SDM Aparatur Desa

Pengembangan SDM aparatur desa merupakan kunci untuk meningkatkan kapasitas dan kualitas pengelolaan pemerintahan desa. Aparatur desa yang terampil dan berkompeten dalam berbagai bidang, seperti administrasi, keuangan, dan hukum pemerintahan, sangat dibutuhkan untuk menjalankan tugas-tugas tersebut dengan baik. Dalam konteks desa-desa di Indonesia, tantangan terbesar dalam pengembangan SDM aparatur adalah keterbatasan akses terhadap pelatihan berkualitas, terutama di daerah pedesaan yang memiliki akses terbatas terhadap fasilitas pendidikan dan pelatihan.

Armstrong (2014) mengungkapkan bahwa pengembangan SDM dalam organisasi pemerintah dapat dilakukan melalui berbagai cara, termasuk pelatihan dan pembelajaran yang dirancang untuk meningkatkan kemampuan teknis dan manajerial. Pembelajaran yang terstruktur, baik yang bersifat formal maupun informal, sangat penting dalam mempersiapkan aparatur desa untuk menghadapi tantangan pengelolaan pemerintahan yang semakin kompleks.

Cahyani & Hidayati (2017) menambahkan bahwa pengembangan SDM aparatur desa perlu dilakukan secara berkelanjutan melalui peningkatan kemampuan dalam hal teknologi, manajerial, serta pemahaman terhadap regulasi dan kebijakan yang ada. Penerapan teknologi dalam pelatihan, seperti yang dilakukan dengan menggunakan LMS, dapat menjadi solusi untuk mengatasi

hambatan geografis dan keterbatasan akses yang sering dihadapi oleh desa-desa terpencil.

2.1.3. Learning Management System (LMS) sebagai Media Pelatihan

Learning Management System (LMS) adalah platform yang digunakan untuk mengelola, mendistribusikan, dan mengevaluasi materi pembelajaran secara daring. LMS memfasilitasi pembelajaran jarak jauh dengan menyediakan akses yang fleksibel dan efisien kepada peserta pelatihan tanpa harus terikat oleh lokasi dan waktu. LMS memungkinkan aparatur desa untuk mengikuti pelatihan dan mengembangkan kompetensinya sesuai dengan jadwal yang mereka tentukan sendiri, yang sangat berguna bagi desa-desa yang terletak di wilayah terpencil dengan keterbatasan akses terhadap pelatihan tatap muka.

Menurut **Ally (2004)**, salah satu keuntungan utama dari penggunaan LMS adalah kemampuannya untuk meningkatkan fleksibilitas dalam pembelajaran. Dengan menggunakan LMS, peserta pelatihan dapat mengakses materi kapan saja dan di mana saja, yang sangat cocok untuk mengatasi hambatan geografis yang ada di desa-desa yang memiliki infrastruktur terbatas. Selain itu, LMS memungkinkan interaksi antar peserta dan instruktur melalui berbagai fitur, seperti forum diskusi, kuis, dan sesi webinar.

Sun et al. (2016) dalam teori **E-learning Adoption Model** menyatakan bahwa keberhasilan pelatihan berbasis digital melalui LMS sangat dipengaruhi oleh faktor-faktor seperti aksesibilitas, motivasi peserta, dan dukungan organisasi. Dalam konteks Desa Kutai Lama, faktor aksesibilitas teknologi menjadi hal yang sangat penting, karena keterbatasan infrastruktur seperti akses internet yang tidak

stabil dapat menghambat efektivitas pelatihan. Teori Terkait Pemanfaatan Learning Management System (LMS).

Pemanfaatan Learning Management System (LMS) dalam pengembangan SDM, khususnya bagi aparatur desa, dapat dilihat dari berbagai perspektif teoretis. Beberapa teori yang relevan untuk menjelaskan bagaimana LMS dapat digunakan dalam pembelajaran dan pengembangan SDM adalah teori konstruktivisme, teori pembelajaran sosial, dan teori adopsi teknologi.

2.2 Teori Konstruktivisme

Teori konstruktivisme, yang dipopulerkan oleh tokoh-tokoh seperti Jean Piaget dan Lev Vygotsky, menekankan pentingnya pembelajaran yang aktif dan partisipatif. Dalam konteks LMS, teori ini menjelaskan bagaimana teknologi dapat membantu peserta didik (dalam hal ini, aparatur desa) untuk membangun pengetahuan mereka sendiri melalui interaksi dengan materi pembelajaran dan rekan-rekan sejawat.

2.2.1. Prinsip Konstruktivisme dalam LMS:

Pembelajaran Aktif: LMS memungkinkan peserta didik untuk mengakses materi pembelajaran secara mandiri, memberi kesempatan untuk belajar sesuai dengan kecepatan mereka sendiri. Fitur-fitur seperti forum diskusi dan kolaborasi online memungkinkan peserta untuk berbagi ide, mengajukan pertanyaan, dan menerima umpan balik, yang memperkaya pemahaman mereka.

Pembelajaran Berbasis Masalah: LMS juga memungkinkan penggunaan metode pembelajaran berbasis masalah (PBL), yang mendorong peserta didik untuk

memecahkan masalah nyata dan relevan. Ini sejalan dengan prinsip konstruktivisme yang mengutamakan pengalaman langsung dalam pembelajaran.

Interaksi Sosial dan Kultural: Menggunakan LMS, aparatur desa dapat berinteraksi dengan sesama peserta didik atau fasilitator melalui platform online, yang juga sejalan dengan teori Vygotsky mengenai pentingnya interaksi sosial dalam pembelajaran. Ini memungkinkan mereka untuk belajar dalam konteks sosial yang mendukung.

2.2.2. Implikasi LMS bagi SDM Aparatur Desa:

Penggunaan LMS dalam pembelajaran dapat mempercepat adaptasi aparatur desa terhadap perubahan digital. Dengan pembelajaran yang lebih fleksibel dan kolaboratif, mereka bisa mengembangkan keterampilan secara mandiri sesuai dengan kebutuhan mereka dalam konteks pekerjaan.

2.2.3. Teori Pembelajaran Sosial (Social Learning Theory)

Teori pembelajaran sosial yang dikembangkan oleh Albert Bandura menekankan pentingnya pengaruh sosial dan lingkungan dalam proses pembelajaran. Pembelajaran sosial terjadi ketika individu belajar dari pengamatan, interaksi, dan peniruan orang lain dalam kelompok sosial mereka.

a. Prinsip-Prinsip Pembelajaran Sosial dalam LMS:

Modeling dan Observasi: Di LMS, konsep ini diterapkan dalam bentuk konten multimedia seperti video pembelajaran, tutorial, atau sesi webinar, yang dapat menunjukkan cara melakukan suatu tugas atau menyelesaikan masalah. Aparatur desa dapat menonton dan meniru cara-cara yang dilakukan oleh instruktur atau rekan sejawat mereka dalam melakukan tugas-tugas tertentu.

Penguatan Sosial: Di LMS, fitur-fitur seperti feedback, like, atau komentar memberikan penguatan sosial yang mendukung motivasi dan keterlibatan peserta didik. Misalnya, aparatur desa yang aktif berpartisipasi dalam diskusi atau berbagi pengetahuan dapat menerima pujian atau umpan balik positif dari fasilitator atau rekan sejawat, yang memperkuat motivasi mereka untuk terus belajar.

Komunitas Pembelajaran: LMS memfasilitasi terbentuknya komunitas pembelajaran virtual, tempat di mana peserta didik bisa saling bertukar informasi dan berbagi pengalaman. Komunitas seperti ini mendukung pembelajaran berbasis sosial, yang memungkinkan peserta didik untuk mengembangkan keterampilan dan pengetahuan dengan bantuan kelompok.

b. Implikasi LMS bagi SDM Aparatur Desa:

Penggunaan LMS dalam pengembangan SDM aparatur desa memungkinkan mereka untuk terlibat dalam pembelajaran yang berbasis komunitas. Dengan model ini, aparatur desa bisa belajar tidak hanya dari materi pembelajaran, tetapi juga dari interaksi sosial dengan kolega dan fasilitator, sehingga meningkatkan kualitas pembelajaran mereka.

2.2.4. Teori Adopsi Teknologi (Technology Acceptance Model)

Teori Adopsi Teknologi (TAM) dikembangkan oleh Fred Davis untuk menjelaskan faktor-faktor yang mempengaruhi penerimaan dan penggunaan teknologi. Dalam konteks LMS, teori ini menjelaskan bagaimana aparatur desa bisa menerima dan amemanfaatkan sistem pembelajaran digital.

a. Komponen Utama dalam TAM:

- **Perceived Ease of Use (PEOU):** Faktor ini merujuk pada sejauh mana pengguna merasa bahwa menggunakan LMS akan bebas dari usaha yang berarti. Jika LMS dirancang dengan antarmuka yang ramah pengguna, mudah dipahami, dan tidak memerlukan keterampilan teknis yang tinggi, maka aparatur desa lebih cenderung untuk menerima dan menggunakannya.
- **Perceived Usefulness (PU):** Ini mengacu pada sejauh mana pengguna percaya bahwa penggunaan LMS akan meningkatkan kinerja mereka. Bagi aparatur desa, jika LMS dianggap sebagai alat yang efektif untuk meningkatkan keterampilan dan efisiensi kerja mereka, maka mereka akan lebih termotivasi untuk menggunakannya.
- **Intention to Use (IU):** Faktor ini mengukur niat pengguna untuk menggunakan LMS secara berkelanjutan. Jika aparatur desa merasa bahwa LMS memberikan manfaat nyata dalam meningkatkan kemampuan mereka, mereka akan lebih cenderung untuk terus menggunakannya dalam jangka panjang.

b. Implikasi LMS bagi SDM Aparatur Desa:

Penerimaan teknologi oleh aparatur desa sangat bergantung pada sejauh mana mereka merasa bahwa LMS akan bermanfaat dalam pekerjaan mereka dan mudah digunakan. Oleh karena itu, pengembangan LMS yang mudah diakses, relevan, dan memberikan manfaat nyata dalam pekerjaan sehari-hari akan meningkatkan keberhasilan penerapan sistem ini dalam pengembangan SDM aparatur desa.

2.2.5. Teori Andragogi

Teori Andragogi, yang dipopulerkan oleh Malcolm Knowles, berfokus pada pembelajaran orang dewasa. Teori ini sangat relevan dalam konteks pengembangan SDM aparatur desa karena mereka adalah pembelajar dewasa yang memiliki pengalaman hidup dan pekerjaan yang lebih banyak dibandingkan anak-anak atau remaja.

a. Prinsip Andragogi dalam LMS:

- **Kebutuhan untuk Memahami Mengapa Belajar:** Orang dewasa cenderung ingin tahu alasan di balik pembelajaran. LMS yang menyediakan informasi yang jelas mengenai manfaat pembelajaran bagi pekerjaan mereka (seperti peningkatan keterampilan dalam manajemen anggaran atau pelayanan publik) akan lebih diterima.
- **Pembelajaran Berdasarkan Pengalaman:** Orang dewasa belajar lebih efektif ketika pembelajaran tersebut berbasis pengalaman. LMS dapat mendukung prinsip ini dengan menyediakan studi kasus, simulasi, atau skenario yang menggambarkan situasi dunia nyata.
- **Kemandirian dalam Pembelajaran:** LMS memberikan fleksibilitas bagi aparatur desa untuk mengatur waktu dan metode belajar mereka sendiri. Ini sesuai dengan prinsip andragogi yang mengutamakan kemandirian dan tanggung jawab individu dalam proses belajar.

b. Implikasi LMS bagi SDM Aparatur Desa:

- LMS yang dirancang dengan memperhatikan prinsip-prinsip andragogi akan lebih efektif dalam melibatkan aparatur desa dalam pembelajaran. Dengan

memberikan mereka kesempatan untuk belajar secara mandiri dan berdasarkan pengalaman, LMS akan lebih mudah diterima dan diaplikasikan dalam pengembangan SDM mereka.

2.2.6. Model Pembelajaran Daring dan Blended Learning

Model pembelajaran daring (online learning) dan blended learning (kombinasi antara pembelajaran daring dan tatap muka) sering digunakan dalam pelatihan berbasis LMS. **Rochman et al. (2019)** menyatakan bahwa blended learning lebih efektif daripada pembelajaran daring sepenuhnya, terutama untuk materi yang membutuhkan interaksi langsung, seperti materi teknis dalam pengelolaan keuangan desa atau aspek hukum pemerintahan.

Menurut **Garrison & Kanuka (2004)**, blended learning dapat memberikan manfaat ganda, yaitu fleksibilitas pembelajaran daring yang didukung oleh interaksi langsung dalam sesi tatap muka. Hal ini memungkinkan peserta untuk lebih memahami materi yang diberikan melalui pengalaman praktis dan diskusi langsung dengan instruktur. Model ini dapat diterapkan di Desa Kutai Lama untuk menyempurnakan pelatihan berbasis LMS, dengan memadukan pelatihan daring dan sesi tatap muka yang dilakukan secara berkala.

2.2.7. Technology Acceptance Model (TAM)

Dalam implementasi LMS di pemerintahan desa, **Technology Acceptance Model (TAM)** yang dikembangkan oleh **Davis (1989)** dapat digunakan untuk memahami faktor-faktor yang mempengaruhi penerimaan teknologi oleh aparatur desa. Model ini menyatakan bahwa penerimaan teknologi dipengaruhi oleh dua

faktor utama: **perceived ease of use** (**kemudahan penggunaan**) dan **perceived usefulness** (**manfaat yang dirasakan**).

Prasetyo & Nugroho (2021) menyatakan bahwa persepsi kemudahan penggunaan dan manfaat LMS sangat mempengaruhi tingkat partisipasi aparatur desa dalam pelatihan daring. Di Desa Kutai Lama, faktor ini menjadi sangat penting, mengingat banyak aparatur desa yang belum terbiasa dengan teknologi digital. Oleh karena itu, pengenalan dan pelatihan awal tentang penggunaan LMS harus dilakukan untuk memastikan bahwa teknologi ini diterima dengan baik oleh aparatur desa. **Technology Acceptance Model (TAM)** dikembangkan oleh Davis (1989) untuk menjelaskan bagaimana individu menerima dan menggunakan teknologi baru. Model ini menekankan dua faktor utama yang memengaruhi adopsi teknologi, yaitu: **Perceived Usefulness (PU)** – Seberapa besar individu percaya bahwa teknologi akan meningkatkan kinerjanya dan **Perceived Ease of Use (PEU)** – Seberapa mudah individu merasa bahwa teknologi dapat digunakan tanpa kesulitan yang signifikan.

Dalam konteks penelitian ini, TAM sangat relevan karena dapat membantu menjelaskan bagaimana aparatur desa menerima dan menggunakan LMS dalam pelatihan mereka. Studi oleh Prasetyo dan Nugroho (2021) menunjukkan bahwa semakin tinggi persepsi kemudahan penggunaan dan manfaat dari LMS, semakin tinggi pula tingkat partisipasi aparatur desa dalam pelatihan daring. Selain itu, faktor eksternal seperti dukungan organisasi dan pelatihan awal juga berperan dalam meningkatkan adopsi LMS (Venkatesh & Bala, 2008). Namun, model TAM memiliki keterbatasan karena tidak sepenuhnya mempertimbangkan faktor

eksternal seperti infrastruktur teknologi dan literasi digital, yang menjadi tantangan utama dalam konteks pemerintahan desa di Indonesia. Oleh karena itu, model ini akan dikombinasikan dengan teori lainnya untuk memberikan pemahaman yang lebih komprehensif.

2.2.8. E-learning Adoption Model – Sun et al. (2016)

Model ini dikembangkan untuk mengevaluasi faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan pelatihan berbasis e-learning. Sun et al. (2016) mengidentifikasi enam faktor utama yang mempengaruhi efektivitas e-learning, yaitu:

1. **Kualitas pengajar** – Kompetensi dan keterlibatan instruktur dalam mendukung pembelajaran daring.
2. **Kualitas teknologi** – Stabilitas platform LMS serta aksesibilitas perangkat teknologi yang digunakan peserta.
3. **Desain kurikulum** – Relevansi materi dengan kebutuhan peserta serta pendekatan interaktif dalam pembelajaran.
4. **Dukungan organisasi** – Komitmen dan kebijakan yang mendukung keberhasilan implementasi pelatihan digital.
5. **Kesiapan peserta** – Tingkat literasi digital dan motivasi belajar dari peserta pelatihan.
6. **Lingkungan pembelajaran** – Faktor eksternal yang dapat mendukung atau menghambat pelaksanaan pelatihan daring.

Dalam konteks penelitian ini, model ini akan digunakan untuk menganalisis faktor-faktor yang memengaruhi efektivitas pelatihan berbasis LMS bagi aparatur

desa. Studi oleh Setiawan et al. (2020) menunjukkan bahwa kesiapan infrastruktur dan literasi digital merupakan tantangan utama dalam implementasi LMS di sektor pemerintahan desa. Oleh karena itu, temuan penelitian ini dapat memberikan wawasan lebih lanjut mengenai strategi yang dapat diterapkan untuk meningkatkan efektivitas pelatihan berbasis LMS.

2.2.9. Blended Learning Theory – Garrison & Vaughan (2008)

Blended Learning Theory menekankan pentingnya kombinasi antara metode pembelajaran daring dan tatap muka untuk meningkatkan efektivitas pelatihan. Menurut Garrison dan Vaughan (2008), keunggulan blended learning terletak pada:

- Fleksibilitas dalam mengakses materi secara daring, tetapi tetap mempertahankan interaksi tatap muka untuk mendukung pemahaman mendalam.
- Meningkatkan keterlibatan peserta dengan mengkombinasikan teknologi dan pendekatan kolaboratif dalam pembelajaran.
- Memberikan pengalaman belajar yang lebih kontekstual dengan studi kasus nyata dan diskusi langsung dengan instruktur.

Dalam konteks penelitian ini, teori ini digunakan untuk membandingkan efektivitas pelatihan LMS berbasis daring sepenuhnya dengan model blended learning. Studi oleh Rochman et al. (2019) menemukan bahwa pendekatan blended learning lebih efektif dalam meningkatkan kompetensi aparatur desa dibandingkan dengan metode daring sepenuhnya. Oleh karena itu, temuan dari penelitian ini dapat

memberikan rekomendasi mengenai strategi terbaik dalam implementasi pelatihan berbasis LMS bagi aparatur desa.

2.2.10. Diffusion of Innovation Theory – Rogers (2003)

Teori ini menjelaskan bagaimana inovasi diterima dan diadopsi oleh suatu kelompok masyarakat. Rogers (2003) mengidentifikasi lima faktor utama yang menentukan tingkat adopsi inovasi, yaitu:

1. *Relative Advantage* – Seberapa besar keuntungan yang dirasakan dibandingkan dengan metode sebelumnya.
2. *Compatibility* – Sejauh mana inovasi sesuai dengan kebutuhan dan kondisi pengguna.
3. *Complexity* – Tingkat kesulitan dalam memahami dan menggunakan inovasi.
4. *Triability* – Kesempatan untuk mencoba inovasi sebelum mengadopsinya secara penuh.
5. *Observability* – Seberapa jelas manfaat inovasi dapat terlihat oleh pengguna lain.

Dalam konteks penelitian ini, teori *Diffusion of Innovation* akan digunakan untuk memahami bagaimana LMS diperkenalkan, diterima, dan diadopsi oleh aparatur desa. Studi oleh Kurniawan et al. (2020) menunjukkan bahwa keberhasilan adopsi LMS sangat bergantung pada seberapa relevan dan mudahnya sistem tersebut digunakan dalam konteks pemerintahan desa.

2.2.11. Teori Strategi Pembelajaran

a. Blended Learning Theory – Garrison & Vaughan (2008)

Teori ini menekankan bahwa kombinasi metode pembelajaran daring dan tatap muka dapat meningkatkan efektivitas pelatihan. Dalam konteks aparatur desa, blended learning dapat digunakan untuk mengatasi keterbatasan LMS dalam hal interaksi langsung dan pemahaman materi teknis (**Rochman et al., 2019**).

b. Constructivist Learning Theory – Piaget (1970)

Teori ini menekankan pentingnya pembelajaran berbasis pengalaman dan interaksi. Dalam konteks LMS, ini berarti bahwa modul pelatihan yang berbasis studi kasus dan simulasi akan lebih efektif dalam meningkatkan pemahaman aparatur desa (**Prasetyo & Nugroho, 2021**).

2.2.12. Tantangan Implementasi LMS di Desa Terpencil

Implementasi LMS di daerah pedesaan seperti Desa Kutai Lama menghadapi beberapa tantangan yang perlu diatasi agar pelatihan berbasis digital dapat berjalan dengan efektif. **Kurniawan et al. (2020)** mengungkapkan bahwa keterbatasan infrastruktur, seperti akses internet yang tidak stabil dan kurangnya perangkat yang memadai, menjadi hambatan utama dalam keberhasilan pelatihan berbasis LMS.

Setiawan et al. (2020) menambahkan bahwa literasi digital aparatur desa yang rendah juga menjadi tantangan besar dalam penerapan LMS. Oleh karena itu, diperlukan pendekatan yang komprehensif, termasuk pelatihan awal mengenai penggunaan LMS serta penyediaan dukungan teknis yang memadai, untuk

memastikan bahwa aparatur desa dapat mengakses dan memanfaatkan platform tersebut secara optimal.

2.3. Faktor Pendukung Transformasi Digital di Desa

1. Infrastruktur Teknologi

Infrastruktur teknologi adalah faktor utama yang mendukung keberhasilan transformasi digital di desa. Hal ini mencakup ketersediaan jaringan internet, perangkat keras, dan perangkat lunak yang memadai. Infrastruktur yang baik memungkinkan akses mudah dan lancar terhadap platform digital seperti LMS.

Siddique et al. (2019) mengemukakan bahwa akses terhadap infrastruktur teknologi yang memadai sangat penting dalam keberhasilan digitalisasi. Dalam konteks desa, keberadaan internet yang stabil dan perangkat yang mendukung memungkinkan aparatur desa untuk mengakses materi pembelajaran online tanpa kendala.

Suryani (2020) menegaskan bahwa ketersediaan infrastruktur digital menjadi faktor penggerak utama dalam proses digitalisasi pemerintahan desa. Dengan adanya infrastruktur yang kuat, desa dapat mengembangkan program-program digital yang efektif dan efisien untuk meningkatkan kapasitas aparatur.

2. Dukungan Pemerintah

Dukungan dari pemerintah pusat maupun daerah sangat krusial dalam mendorong transformasi digital di desa. Dukungan ini dapat berupa kebijakan, anggaran, serta penyediaan fasilitas yang memungkinkan desa untuk beralih ke sistem digital. Pemerintah yang proaktif dalam mendukung digitalisasi pemerintahan desa akan membantu mempercepat proses transformasi ini.

Rachmat et al. (2021) berpendapat bahwa kebijakan pemerintah yang mendukung pengembangan infrastruktur dan teknologi di desa, seperti program pembangunan internet desa, adalah pendorong utama keberhasilan digitalisasi desa. Pemerintah yang memfasilitasi pelatihan dan pendampingan kepada aparatur desa juga memiliki peran penting dalam mempercepat adopsi teknologi.

Kartini et al. (2020) menambahkan bahwa pemerintah perlu menyediakan regulasi dan kebijakan yang mendukung penggunaan teknologi dalam administrasi dan manajemen pemerintahan desa. Tanpa kebijakan yang jelas dan terarah, transformasi digital di desa akan terhambat.

3. Kemampuan Aparatur

Kemampuan aparatur desa dalam menggunakan teknologi digital adalah salah satu faktor pendukung penting dalam transformasi digital. Semakin tinggi tingkat literasi digital dan kemampuan aparatur desa, semakin mudah mereka mengadaptasi dan memanfaatkan teknologi dalam melaksanakan tugas pemerintahan.

Hendrik et al. (2018) menyatakan bahwa tingkat literasi digital di kalangan aparatur desa sangat memengaruhi keberhasilan implementasi teknologi digital. Aparatur yang memiliki kemampuan menggunakan teknologi akan lebih siap untuk mengadopsi sistem LMS atau platform digital lainnya.

Widodo (2019) menambahkan bahwa pelatihan keterampilan digital bagi aparatur desa dapat meningkatkan kemampuan mereka dalam menjalankan administrasi pemerintahan dan mengelola informasi yang lebih efektif.

2.4. Faktor Penghambat Transformasi Digital di Desa

1. Keterbatasan Akses Internet

Salah satu faktor penghambat utama dalam penerapan teknologi digital di desa adalah keterbatasan akses internet. Di banyak daerah pedesaan, infrastruktur internet belum memadai, yang menyebabkan kesulitan bagi aparatur desa untuk mengakses dan memanfaatkan platform digital seperti LMS.

Hidayat (2020) mengungkapkan bahwa akses internet yang terbatas di daerah pedesaan menjadi hambatan besar dalam proses digitalisasi pemerintahan desa. Keterbatasan ini menghambat aparatur desa dalam mengikuti pelatihan online dan mengakses informasi digital yang dapat meningkatkan kinerja mereka.

Sutrisno (2021) menjelaskan bahwa meskipun teknologi informasi dapat meningkatkan efektivitas kerja, ketersediaan internet yang terbatas di beberapa desa menjadi penghambat besar dalam penggunaan sistem digital untuk administrasi dan pengelolaan desa.

2. Kurangnya Pelatihan

Kurangnya pelatihan bagi aparatur desa dalam hal penggunaan teknologi informasi dan platform digital seperti LMS menjadi faktor penghambat utama dalam transformasi digital. Tanpa pelatihan yang memadai, aparatur desa akan kesulitan untuk memanfaatkan teknologi secara efektif.

Nugroho et al. (2019) mengemukakan bahwa pelatihan yang tidak memadai atau tidak ada sama sekali menyebabkan aparatur desa tidak memiliki keterampilan yang diperlukan untuk memanfaatkan LMS atau sistem digital lainnya

dalam pekerjaan mereka. Hal ini menghambat upaya untuk meningkatkan kinerja mereka melalui teknologi.

Anwar (2021) menambahkan bahwa meskipun ada banyak teknologi yang dapat diterapkan untuk mempercepat transformasi digital di desa, tanpa adanya pelatihan yang cukup bagi aparatur, teknologi tersebut tidak akan efektif digunakan.

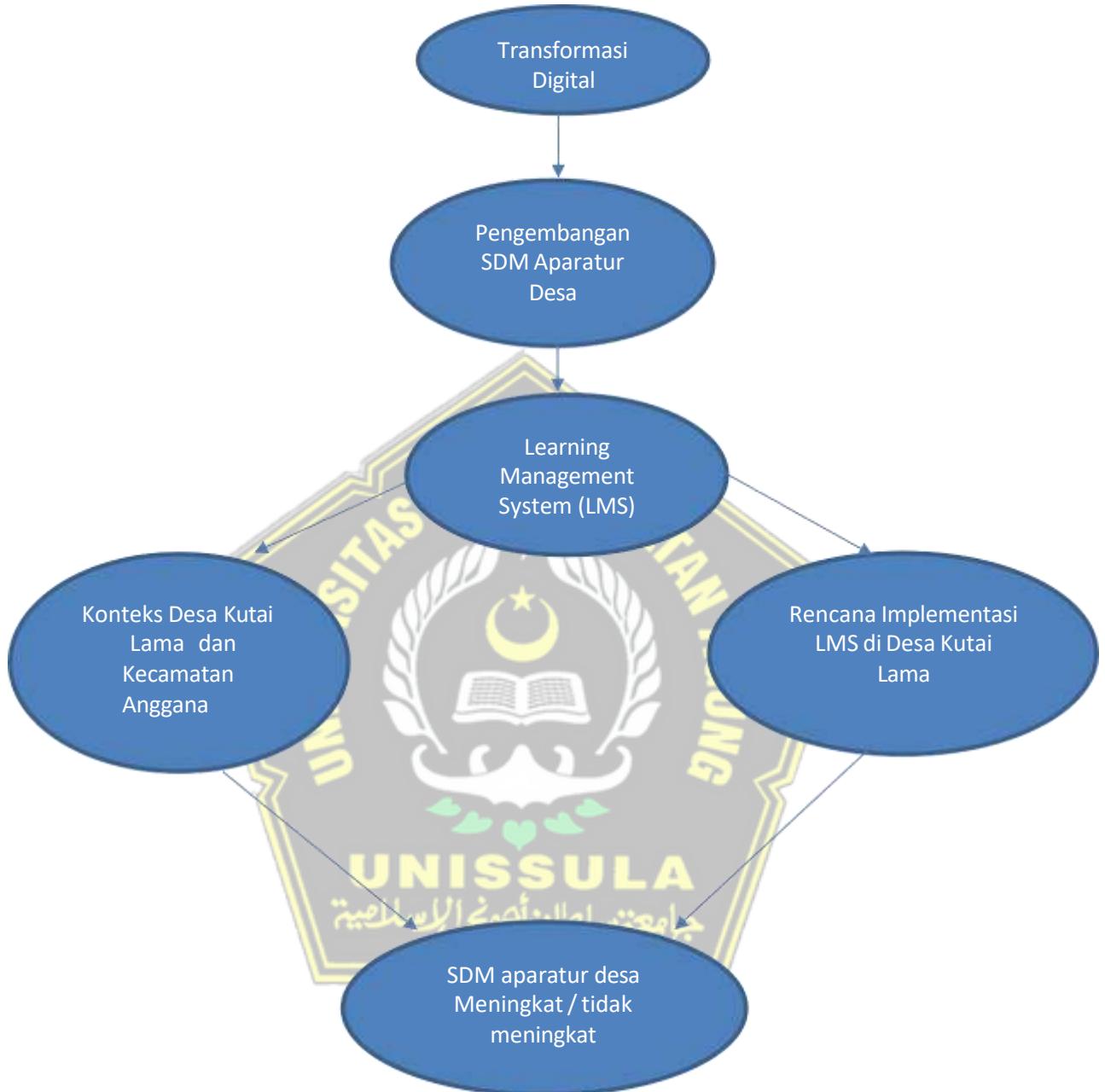
3. Hambatan Budaya Digital

Hambatan budaya digital di desa dapat muncul dalam bentuk resistensi terhadap perubahan, ketidakpercayaan terhadap teknologi, atau kebiasaan bekerja secara manual. Banyak aparatur desa yang terbiasa dengan cara kerja konvensional dan merasa nyaman dengan sistem yang sudah ada, sehingga sulit untuk menerima perubahan menuju digitalisasi.

Purwanto (2020) mengungkapkan bahwa budaya tradisional di desa yang lebih mengutamakan interaksi tatap muka dan penggunaan sistem manual menjadi hambatan besar bagi adopsi teknologi digital. Budaya digital yang rendah di kalangan aparatur desa dapat memperlambat proses transformasi digital.

Yuniarti (2021) menyatakan bahwa resistensi terhadap perubahan dan ketidakpahaman terhadap manfaat teknologi menjadi hambatan psikologis yang signifikan dalam penerimaan transformasi digital di desa. Aparatur desa yang lebih tua atau kurang terpapar teknologi cenderung lebih sulit untuk beradaptasi dengan sistem baru.

2.5. Karangka Pikir



BAB 3

METODE PENELITIAN

3.1. Desain Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan **mixed methods** (metode campuran), yaitu kombinasi antara metode kuantitatif dan kualitatif. Pendekatan ini dipilih untuk mendapatkan pemahaman yang lebih komprehensif mengenai efektivitas pelatihan berbasis Learning Management System (LMS) bagi aparatur desa di Indonesia.

Metode Kuantitatif digunakan untuk mengukur tingkat adopsi LMS, efektivitas pelatihan, dan peningkatan kompetensi aparatur desa menggunakan data statistik.. sedangkan **Metode Kualitatif** digunakan untuk menggali faktor-faktor yang memengaruhi keberhasilan atau hambatan dalam implementasi pelatihan LMS melalui wawancara mendalam dan analisis dokumen. Jenis penelitian ini termasuk dalam **penelitian evaluatif**, yang bertujuan untuk mengukur sejauh mana kebijakan pelatihan berbasis LMS efektif dalam meningkatkan kapasitas aparatur desa.

3.2. Populasi dan Sampel

1. Populasi

Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh Aparatur Desa, BPD, LPM Karang Taruna, Kepala Dusun dan RT di Desa Kutai Lama Kecamatan Anggana Kabupaten Kutaikartanegara yang telah mengikuti pelatihan berbasis LMS yang diselenggarakan oleh Direktorat Jenderal Bina Pemerintahan Desa atau lembaga lain yang bekerja sama dengan pemerintah.

2. Sampel

Karena cakupan populasi yang begitu luas, penelitian ini menggunakan **teknik snowball sampling**, dengan kriteria sebagai berikut:

- a. Aparatur desa yang telah mengikuti pelatihan LMS dalam dua tahun terakhir (2023–2024).
- b. Desa yang memiliki infrastruktur digital memadai maupun desa yang masih mengalami keterbatasan akses teknologi.
- c. Aparatur desa dengan tingkat literasi digital yang beragam.

3.3. Instrumen Penelitian

Untuk memperoleh data yang valid dan reliabel, penelitian ini menggunakan beberapa instrumen pengumpulan data sebagai berikut:

- a. **Kuesioner** – Digunakan dalam metode kuantitatif untuk mengukur persepsi, tingkat adopsi LMS, dan efektivitas pelatihan.
- b. **Wawancara Mendalam** – Digunakan dalam metode kualitatif untuk mengeksplorasi pengalaman aparatur desa dalam mengikuti pelatihan LMS.
- c. **Dokumentasi** – Menggunakan laporan evaluasi program pelatihan LMS yang telah dilakukan sebelumnya oleh pemerintah atau lembaga terkait.

3.4. Prosedur Penelitian

Penelitian ini dilakukan dalam beberapa tahapan sebagai berikut:

A. Tahap Persiapan

1. Penyusunan instrumen penelitian (kuesioner dan pedoman wawancara)

2. Uji coba instrumen kepada kelompok kecil untuk menguji validitas dan reliabilitas.
3. **Tahap Pengumpulan** baran kuesioner secara daring kepada sampel terpilih.
4. Pelaksanaan wawancara mendalam dengan narasumber kunci.
5. Pengumpulan data sekunder dari dokumen dan laporan evaluasi program LMS.

B. Tahap Analisis Data

1. Data kuantitatif dianalisis menggunakan **analisis statistik deskriptif dan inferensial**.
2. Data kualitatif dianalisis menggunakan **teknik analisis tematik** untuk mengidentifikasi pola temuan dari wawancara.

C. Tahap Penyusunan Hasil

1. Interpretasi hasil penelitian dan penyusunan laporan.
2. Penyampaian rekomendasi untuk optimalisasi pelatihan LMS bagi aparatur desa.

3.5. Teknik Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data dalam penelitian ini mencakup:

1. **Survei** dengan kuesioner berbasis Likert scale (1–5) untuk mengukur variabel penelitian.
2. **Wawancara** dengan pertanyaan semi-terstruktur untuk mendapatkan informasi mendalam terkait kendala dan peluang dalam implementasi LMS.

3. **Studi Dokumentasi** untuk mengkaji kebijakan dan laporan terkait efektivitas pelatihan berbasis LMS.

3.6. Teknik Analisis Data

A. Analisis Data Kualitatif

Data kualitatif dari wawancara dianalisis menggunakan **analisis tematik**, dengan langkah-langkah sebagai berikut:

1. **Transkripsi Wawancara** – Menuliskan hasil wawancara secara verbatim.
2. **Kodefikasi** – Mengelompokkan data berdasarkan tema tertentu (misalnya, kendala teknis, kesiapan peserta, dukungan organisasi).
3. **Interpretasi Data** – Menarik kesimpulan dari pola temuan yang muncul.

B. Analisis Data Kuantitatif

Analisis data kuantitatif dalam penelitian ini dilakukan dengan **analisis deskriptif**, yang bertujuan untuk menggambarkan kondisi aktual berdasarkan data yang dikumpulkan. Dua metode utama yang digunakan adalah **Analisis SWOT** dan **Analisis Kesenjangan (Existing vs Theory)**.

C. Analisis SWOT

Analisis Strengths, Weaknesses, Opportunities, and Threats (SWOT) digunakan untuk mengevaluasi faktor internal dan eksternal yang memengaruhi efektivitas pelatihan berbasis Learning Management System (LMS) bagi aparatur desa. **Langkah-langkah Analisis SWOT dalam Penelitian Ini:**

1. Identifikasi Faktor SWOT

- Mengumpulkan data dari survei, wawancara, dan dokumen terkait pelatihan berbasis LMS.
- Mengategorikan temuan berdasarkan faktor **kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman.**

2. Penyusunan Matriks SWOT

Menghubungkan faktor internal dan eksternal untuk menentukan strategi peningkatan efektivitas LMS.

3. Formulasi Strategi

- **Strategi SO (Strength-Opportunities):** Memanfaatkan kekuatan untuk menangkap peluang (misalnya, menggunakan dukungan kebijakan pemerintah untuk memperluas cakupan LMS).
- **Strategi WO (Weaknesses-Opportunities):** Meminimalkan kelemahan dengan memanfaatkan peluang (misalnya, meningkatkan literasi digital aparatur desa melalui pendampingan dari penyedia teknologi).
- **Strategi ST (Strength-Threats):** Menggunakan kekuatan untuk mengatasi ancaman (misalnya, mengoptimalkan kebijakan dan anggaran untuk mengatasi ketimpangan akses teknologi).
- **Strategi WT (Weaknesses-Threats):** Mengurangi dampak kelemahan dan ancaman (misalnya, mengembangkan model **blended learning** untuk menyesuaikan dengan keterbatasan akses internet).

4. Analisis Kesenjangan (Existing vs Theory)

Analisis kesenjangan (gap analysis) digunakan untuk membandingkan kondisi aktual (existing condition) dengan standar atau teori yang ideal mengenai efektivitas pelatihan LMS dalam meningkatkan kapasitas aparatur desa. Langkah-langkah Analisis Kesenjangan dalam Penelitian Ini:

- **Identifikasi Standar atau Model Teoritis**

Menggunakan teori **Technology Acceptance Model (TAM)**, **E-learning Adoption Model**, **Blended Learning Theory**, dan **Diffusion of Innovation Theory** sebagai acuan kondisi ideal pelatihan berbasis LMS. **Pengukuran Kondisi Eksisting** Menganalisis hasil survei, wawancara, dan studi dokumen mengenai implementasi LMS di desa-desa.

- **Identifikasi Kesenjangan**

Menentukan perbedaan antara kondisi eksisting dengan teori yang ideal, serta faktor penyebab kesenjangan tersebut.

- **Formulasi Rekomendasi**

Mengusulkan strategi untuk menutup kesenjangan, misalnya:

- **Meningkatkan literasi digital** melalui program pendampingan sebelum pelatihan LMS.
- **Mengembangkan pendekatan blended learning** agar lebih efektif bagi aparatur desa.
- **Mendorong kebijakan afirmatif** untuk meningkatkan infrastruktur digital di desa-desa terpencil.

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian

Deskripsi Umum Desa Kutai Lama Desa Kutai Lama terletak di Kecamatan Anggana, Kabupaten Kutai Kartanegara, Provinsi Kalimantan Timur. Desa ini memiliki potensi sumber daya manusia yang beragam, namun masih menghadapi tantangan dalam pengembangan kapasitas aparatur desanya.

1. Implementasi Learning Management System (LMS) Pada tahun 2023, Desa Kutai Lama mulai mengimplementasikan Learning Management System (LMS) sebagai upaya untuk meningkatkan kompetensi aparatur desa. LMS yang digunakan adalah platform berbasis web yang memungkinkan akses materi pelatihan secara online.
2. Partisipasi Aparatur Desa Dari 30 aparatur desa yang terdaftar, 25 aparatur (83%) aktif berpartisipasi dalam program pelatihan yang disediakan melalui LMS. Data menunjukkan bahwa tingkat partisipasi meningkat seiring dengan peningkatan pemahaman aparatur tentang teknologi digital.
3. Evaluasi Hasil Pelatihan Hasil evaluasi menunjukkan bahwa 70% aparatur desa mengalami peningkatan pengetahuan dan keterampilan setelah mengikuti pelatihan. Ujian akhir menunjukkan rata-rata nilai 80, yang menunjukkan pemahaman yang baik terhadap materi yang diajarkan.

B. Hasil wawancara

1. **Hasil Wawancara Sebelum Pemanfaatan Learning Management System (LMS)**

A. Pemahaman peserta pelatihan Learning Management System (LMS)

Learning Management System (LMS) merupakan alat yang sangat efektif untuk meningkatkan kualitas pembelajaran dan pengembangan SDM. Sebagian besar peserta mengaku belum memiliki pemahaman yang mendalam tentang Learning Management System (LMS). Beberapa peserta menyatakan bahwa mereka hanya mengetahui LMS sebagai platform untuk pembelajaran online, namun tidak memahami sepenuhnya manfaat dan fitur yang ditawarkan. Salah satu peserta,

Bapak Maullidin (Kepala Desa), menyatakan:

"Saya tahu LMS itu untuk belajar online, tapi saya belum tahu bagaimana cara kerjanya dan apa saja yang bisa saya pelajari di dalamnya."

Ibu Maisyarah (Kaur Keuangan):

"Saya pernah mendengar tentang LMS, tetapi saya tidak tahu banyak tentang fitur-fitur yang ada di dalamnya. Saya hanya tahu bahwa itu digunakan untuk kursus online. Saya ingin tahu lebih banyak tentang bagaimana saya bisa menggunakan LMS untuk meningkatkan keterampilan saya, terutama dalam bidang yang saya minati."

Bapak Heriyansyah (Sekretaris) :

"Saya baru pertama kali mendengar istilah LMS saat mendaftar pelatihan ini. Saya pikir itu hanya sekadar tempat untuk mengakses materi pembelajaran. Namun, setelah mengikuti beberapa sesi, saya mulai penasaran tentang bagaimana LMS bisa membantu saya dalam proses belajar, seperti pelacakan kemajuan dan interaksi dengan instruktur."

Ibu Desi Ratna Sari (Kasi Pelayanan):

"Saya tahu bahwa LMS adalah alat yang penting untuk pembelajaran jarak jauh, tetapi saya merasa bingung dengan berbagai istilah dan fitur yang ada. Misalnya, saya mendengar tentang forum diskusi dan kuis, tetapi saya belum sepenuhnya memahami bagaimana cara memanfaatkannya untuk belajar lebih efektif."

Dari hasil wawancara ini, terlihat bahwa peserta pelatihan memiliki keinginan untuk memahami lebih dalam tentang LMS dan bagaimana memanfaatkannya untuk mendukung proses belajar mereka.

Noor Ikhsan Muttaqin,S.IP.,M.Si. adalah pelatih LMS menjelaskan:

"Dengan LMS, proses belajar mengajar menjadi lebih terstruktur dan mudah diakses. Aparatur desa dapat belajar kapan saja dan di mana saja, yang sangat penting mengingat keterbatasan waktu dan mobilitas mereka."

B. Harapan Peserta terhadap LMS

Peserta memiliki harapan yang tinggi terhadap pemanfaatan LMS dalam pengembangan SDM aparatur desa. Mereka berharap LMS dapat memberikan akses yang lebih mudah terhadap materi pelatihan dan pengembangan keterampilan.

Bapak Maullidin (Kepala Desa), salah satu peserta, mengungkapkan:

"Saya berharap dengan adanya LMS, kami bisa belajar kapan saja dan di mana saja. Ini akan sangat membantu kami yang terkadang sulit untuk mengikuti pelatihan secara langsung."

Bapak Heriyansyah (Sekretaris) :

"Saya sangat berharap LMS ini bisa menyediakan berbagai materi yang relevan dengan kebutuhan kami di desa. Dengan adanya modul-modul

yang terstruktur, kami bisa lebih mudah memahami dan menerapkan ilmu yang didapat. Selain itu, saya juga berharap ada forum diskusi di dalam LMS, sehingga kami bisa saling bertukar pikiran dan pengalaman."

Ibu Maisyarah (Kaur Keuangan):

"Harapan saya adalah LMS ini bisa menjadi sarana yang interaktif. Saya ingin ada video pembelajaran dan kuis yang bisa membantu kami mengukur pemahaman. Dengan cara ini, belajar akan terasa lebih menyenangkan dan tidak monoton. Saya percaya, jika LMS dirancang dengan baik, kami akan lebih termotivasi untuk belajar."

Ibu Desi Ratna Sari (Kasi Pelayanan):

"Saya berharap LMS ini bisa diakses dengan mudah oleh semua aparatur desa, termasuk mereka yang mungkin tidak terlalu paham teknologi. Penting bagi kami untuk mendapatkan pelatihan yang inklusif. Selain itu, saya juga berharap ada sertifikat yang bisa kami dapatkan setelah menyelesaikan pelatihan, sebagai pengakuan atas usaha dan waktu yang kami investasikan."

Dengan harapan-harapan ini, para peserta menunjukkan antusiasme dan keinginan untuk memanfaatkan LMS sebagai alat pengembangan diri yang efektif.

C. Beberapa tantangan dalam pemanfaatan LMS

Beberapa tantangan yang mereka hadapi sebelum pemanfaatan LMS. Salah satu tantangan utama adalah kurangnya pengetahuan teknologi informasi di antara beberapa aparatur desa. Bapak Maullidin (Kepala Desa) menyampaikan:

"Beberapa rekan saya masih kesulitan menggunakan komputer dan internet. Ini menjadi tantangan tersendiri untuk bisa memanfaatkan LMS dengan baik."

Bapak Heriyansyah (Sekretaris) :

"Saya merasa sangat antusias dengan adanya LMS, tetapi saya juga merasakan kesulitan. Banyak dari kami yang belum terbiasa dengan platform digital. Misalnya, saat mencoba mengakses materi pelatihan secara online, saya sering kali bingung dengan navigasinya. Saya berharap ada sesi pelatihan khusus tentang penggunaan teknologi ini."

Ibu Maisyarah (Kaur Keuangan):

"Sama seperti rekan-rekan lainnya, saya juga mengalami kesulitan. Selain masalah teknis, ada juga kekhawatiran tentang keamanan data. Kami perlu pemahaman yang lebih baik tentang bagaimana melindungi informasi yang kami masukkan ke dalam sistem. Ini penting agar kami merasa lebih nyaman dalam menggunakan LMS."

Ibu Desi Ratna Sari (Kasi Pelayanan):

"Saya sangat mendukung penggunaan LMS, tetapi saya merasa bahwa dukungan dari pihak pengelola sangat penting. Beberapa dari kami tidak memiliki akses internet yang stabil di desa. Jika ada solusi untuk masalah ini, seperti penyediaan hotspot atau pelatihan offline, itu akan sangat membantu kami dalam memanfaatkan LMS dengan lebih baik."

Dengan berbagi pengalaman dan tantangan ini, peserta pelatihan berharap dapat menemukan solusi bersama untuk meningkatkan pemanfaatan

LMS di lingkungan mereka. Meskipun optimis, pelatih juga mengidentifikasi beberapa tantangan yang mungkin dihadapi dalam implementasi LMS. Salah satunya adalah tingkat literasi digital yang bervariasi di antara aparatur desa.

"Tidak semua aparatur desa memiliki kemampuan teknologi yang sama.

Oleh karena itu, perlu ada pelatihan awal untuk memastikan semua orang dapat menggunakan LMS dengan baik," ujarnya.

2. Hasil Wawancara pada saat proses pelatihan Learning Management System (LMS)

a. Tahapan pelatihan

Bapak Maullidin:

"Saya merasa pelatihan ini sangat bermanfaat. Sebelumnya, saya tidak terlalu familiar dengan teknologi, tetapi instruktur menjelaskan dengan sangat jelas. Saya belajar bagaimana cara mengelola materi pelatihan dan berinteraksi dengan staf desa melalui platform ini. Ini akan sangat membantu dalam meningkatkan kapasitas SDM di desa kami."

Ibu Fitriani, Kasi Kesejahteraan Desa

"Saya sangat menyukai fitur interaktif yang ada di LMS. Kami bisa berdiskusi dan bertanya langsung kepada instruktur. Selain itu, materi yang disediakan juga mudah diakses kapan saja. Ini membuat saya lebih fleksibel dalam belajar dan mengulang materi yang belum saya pahami."

Bapak Tomi Ruslan,

"Ya, saya yakin pelatihan ini akan memberikan dampak yang signifikan.

Dengan adanya LMS, kami bisa terus belajar dan mengembangkan

keterampilan tanpa harus menunggu pelatihan tatap muka. Ini juga akan memudahkan kami dalam berbagi informasi dan pengetahuan di antara anggota BPD dan masyarakat."

Dari hasil wawancara di atas, terlihat bahwa peserta pelatihan LMS merasa antusias dan mendapatkan banyak manfaat dari pelatihan tersebut. Mereka percaya bahwa penggunaan LMS akan meningkatkan pengembangan SDM di desa dan mempermudah akses terhadap informasi dan pembelajaran.

b. Waktu pelatihan

Peserta 1: Maullidin (Kepala Desa)

"Pelatihan ini berlangsung selama dua hari. Setiap harinya, kami belajar selama sekitar 6 jam, dengan jeda istirahat di tengah sesi. Saya merasa waktu yang diberikan cukup untuk memahami dasar-dasar LMS."

Peserta 2: Fitriani Kasi Kesejahteraan Desa

"Kami mengikuti pelatihan selama tiga hari. Setiap sesi diisi dengan materi yang sangat bermanfaat, dan kami juga diberikan waktu untuk praktik langsung. Total waktu pelatihan sekitar 18 jam, dan itu sangat membantu kami dalam memahami penggunaan LMS."

Peserta 3: Bapak Tomi Ruslan (Ketua BPD)

"Pelatihan ini berlangsung selama dua setengah hari. Hari pertama kami fokus pada teori, dan di hari kedua serta setengah hari terakhir, kami lebih banyak melakukan praktik. Saya rasa waktu yang diberikan sudah cukup efektif."

Pelatih: Muriyanto,S.STP.M.Si. (Trainer LMS)

Waktu Pelatihan: "Pelatihan ini dirancang selama tiga hari, dengan total waktu sekitar 20 jam. Kami membagi sesi menjadi teori dan praktik agar peserta bisa langsung menerapkan apa yang mereka pelajari. Saya melihat antusiasme peserta sangat tinggi, dan mereka mampu menyerap materi dengan baik dalam waktu yang telah ditentukan."

Dari hasil wawancara di atas, dapat disimpulkan bahwa durasi pelatihan LMS bervariasi antara dua hingga tiga hari, dengan total waktu pelatihan berkisar antara 18 hingga 20 jam. Peserta merasa waktu tersebut cukup untuk memahami dan mempraktikkan penggunaan LMS secara efektif.

c. tantangan yang dihadapi saat pelatihan

Wawancara 1: Bapak Maullidin, Kepala Desa Tantangan yang Dihadapi:
"Salah satu tantangan utama yang saya hadapi selama pelatihan adalah kurangnya pemahaman awal tentang teknologi. Sebagian besar dari kami, terutama yang lebih tua, tidak terbiasa dengan penggunaan perangkat lunak seperti LMS. Ini membuat proses belajar menjadi lebih lambat. Namun, instruktur sangat membantu dan sabar dalam menjelaskan setiap langkah."

Wawancara 2: Fitriani Kasi Kesejahteraan Desa. Tantangan yang

Dihadapi:

"Saya merasa kesulitan dengan koneksi internet yang tidak stabil. Beberapa kali, saat kami sedang melakukan sesi praktik, koneksi terputus dan itu membuat kami kehilangan fokus. Selain itu, ada beberapa fitur

dalam LMS yang masih membingungkan bagi saya, seperti cara mengunggah materi dan mengelola forum diskusi."

Wawancara 3: Bapak Tomi Ruslan, Ketua BPD Tantangan yang dihadapi:

"Saya mengalami kesulitan dalam beradaptasi dengan antarmuka LMS. Meskipun saya sudah mengikuti beberapa pelatihan sebelumnya, setiap platform memiliki cara kerja yang berbeda. Saya juga merasa perlu lebih banyak waktu untuk berlatih secara mandiri agar bisa lebih memahami semua fitur yang ada. Namun, saya yakin dengan latihan yang cukup, saya akan bisa menguasainya."

Dari hasil wawancara di atas, dapat disimpulkan bahwa tantangan utama yang dihadapi peserta pelatihan LMS di Desa Kutai Lama meliputi kurangnya pemahaman teknologi, masalah koneksi internet, dan kesulitan dalam beradaptasi dengan antarmuka LMS. Meskipun demikian, dukungan dari instruktur dan keinginan peserta untuk belajar menjadi faktor positif dalam proses transformasi digital ini.

Tantangan yang dihadapi oleh pelatih saat pelatihan juga dirasakan seperti yang dirasakan oleh peserta, hal ini disampaikan oleh kepala Desa:

"Salah satu tantangan terbesar adalah tingkat pemahaman teknologi di antara aparatur desa. Beberapa peserta awalnya merasa kesulitan dengan penggunaan perangkat digital. Namun, dengan bimbingan yang intensif, mereka mulai beradaptasi dan merasa lebih percaya diri."

hal serupa disampaikan juga oleh Pelatih:

"Salah satu tantangan terbesar adalah tingkat pemahaman teknologi yang bervariasi di antara peserta. Beberapa dari mereka belum terbiasa dengan penggunaan perangkat digital. Namun, kami berusaha untuk memberikan penjelasan yang sederhana dan memberikan waktu yang cukup untuk praktik."

3. Hasil Wawancara setelah pelatihan Learning Management System (LMS)

a. Dampak Dari Pelatihan

Ibu Maisyarah (Kaur Keuangan):

"Pelatihan LMS sangat bermanfaat bagi saya. Saya merasa lebih percaya diri dalam menggunakan teknologi untuk mengelola data dan informasi di desa. Dengan LMS, saya bisa mengakses materi pelatihan kapan saja dan di mana saja. Ini sangat membantu dalam pekerjaan saya sehari-hari."

Bapak Heriyansyah (Sekretaris) ;

"Dampaknya sangat positif. Saya bisa lebih efisien dalam mengelola anggaran dan laporan keuangan. LMS memberikan saya akses ke berbagai sumber belajar yang relevan, sehingga saya bisa terus meningkatkan kemampuan saya. Selain itu, kolaborasi dengan rekan-rekan juga menjadi lebih mudah."

Ibu Fitriani Kasi Kesejahteraan Desa;

"Tentu saja! Pelatihan ini membuka wawasan saya tentang bagaimana teknologi dapat digunakan untuk pengembangan masyarakat. Saya

sekarang bisa merancang program pelatihan untuk masyarakat dengan lebih baik, menggunakan LMS sebagai platform untuk menyampaikan materi. Ini sangat membantu dalam meningkatkan partisipasi masyarakat."

Kepala Desa: Maullidin

"Saya sangat senang dengan hasil pelatihan ini. Aparat desa kami kini lebih terampil dalam menggunakan teknologi. LMS telah menjadi alat yang efektif untuk meningkatkan kapasitas SDM di desa. Saya melihat peningkatan dalam kinerja mereka, dan ini berdampak positif pada pelayanan kepada masyarakat. Saya berharap pelatihan seperti ini dapat dilanjutkan dan diperluas ke lebih banyak aparat desa."

d. harapan setelah pelatihan

Ibu Fitriani Kasi Kesejahteraan Desa "Pelatihan ini sangat bermanfaat bagi saya. Saya merasa lebih percaya diri dalam menggunakan teknologi untuk mengelola data dan informasi di desa. Dengan LMS, saya bisa lebih mudah mengakses materi pelatihan dan berkolaborasi dengan rekan-rekan lainnya."

Lanjut ibu Fitriani

"Saya berharap setelah pelatihan ini, kami bisa menerapkan LMS secara maksimal di desa. Ini akan membantu meningkatkan efisiensi kerja kami dan mempermudah proses pembelajaran bagi semua aparatur desa."

Bapak Heriyansyah, Sekretaris Desa:

"Saya sangat antusias dengan penerapan LMS. Selama pelatihan, saya belajar banyak tentang cara mengelola proyek dan sumber daya dengan

lebih baik. LMS memberikan platform yang baik untuk berbagi informasi dan pengalaman." Saya berharap semua aparatur desa bisa menggunakan LMS dengan baik. Ini akan meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat dan mempercepat proses pengambilan keputusan."

Ibu Maisyarah (Kaur Keuangan)

"Pelatihan ini membuka wawasan saya tentang pentingnya teknologi dalam pengelolaan keuangan desa. Dengan LMS, saya bisa belajar lebih banyak tentang manajemen keuangan yang baik dan transparan. Saya berharap kami bisa terus mendapatkan dukungan dan pelatihan lanjutan. Dengan begitu, kami bisa lebih siap menghadapi tantangan di masa depan dan memberikan pelayanan yang lebih baik kepada masyarakat."

Kepala Desa: Maullidin

"Saya sangat mendukung pelatihan ini. Transformasi digital adalah langkah penting untuk meningkatkan kinerja aparatur desa. LMS memberikan kesempatan bagi kami untuk belajar dan mengembangkan keterampilan yang diperlukan dalam era digital ini. Dengan pelatihan LMS, kami dapat mengakses materi pembelajaran kapan saja dan di mana saja, yang tentunya sangat memudahkan. Selain itu, pelatihan ini juga akan membantu kami dalam meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, karena kami akan lebih siap dan terampil dalam menggunakan teknologi untuk kepentingan desa. Saya percaya bahwa investasi dalam pelatihan ini akan membawa dampak positif bagi kemajuan desa kami ke depannya."

BAB V

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Transformasi Digital dalam Pengembangan SDM Aparatur Desa Melalui Pemanfaatan Learning Management System (LMS) Desa Kutai Lama Kecamatan Anggana Kabupaten Kutai Kartanegara Provinsi Kalimantan Timur. Learning Management System (LMS) merupakan alat yang sangat efektif untuk meningkatkan kualitas pembelajaran dan pengembangan SDM. Sebagian besar peserta mengaku belum memiliki pemahaman yang mendalam tentang Learning Management System (LMS). Beberapa peserta menyatakan bahwa mereka hanya mengetahui LMS sebagai platform untuk pembelajaran online, namun tidak memahami sepenuhnya manfaat dan fitur yang ditawarkan. Harapan Peserta terhadap LMS

Peserta memiliki harapan yang tinggi terhadap pemanfaatan LMS dalam pengembangan SDM aparatur desa. Mereka berharap LMS dapat memberikan akses yang lebih mudah terhadap materi pelatihan dan pengembangan keterampilan. Dengan harapan-harapan ini, para peserta menunjukkan antusiasme dan keinginan untuk memanfaatkan LMS sebagai alat pengembangan diri yang efektif.

beberapa tantangan yang mereka hadapi sebelum pemanfaatan LMS. Salah satu tantangan utama adalah kurangnya pengetahuan teknologi informasi di antara beberapa aparatur desa. Dengan berbagi pengalaman dan tantangan

ini, peserta pelatihan berharap dapat menemukan solusi bersama untuk meningkatkan pemanfaatan LMS di lingkungan mereka.

durasi pelatihan LMS bervariasi antara dua hingga tiga hari, dengan total waktu pelatihan berkisar antara 18 hingga 20 jam. Peserta merasa waktu tersebut cukup untuk memahami dan mempraktikkan penggunaan LMS secara efektif. Manfaat penggunaan LMS, Aparatur desa akan mendapatkan pengetahuan dan keterampilan baru yang relevan dengan tugas dan tanggung jawab mereka, sehingga dapat meningkatkan kinerja dalam pelayanan publik. Dengan menggunakan LMS, pelatihan dapat diakses kapan saja dan di mana saja, memudahkan aparatur desa untuk belajar sesuai dengan waktu dan kemampuan mereka. dapat mengurangi biaya dan waktu yang diperlukan untuk pelatihan tatap muka, seperti transportasi dan akomodasi. Peningkatan Kualitas Layanan: Dengan peningkatan kompetensi aparatur desa, diharapkan kualitas layanan kepada masyarakat juga akan meningkat, yang pada gilirannya dapat meningkatkan kepuasan masyarakat.

B. SARAN

1. Untuk Pemerintah
 - a. Peningkatan Infrastruktur Digital: Pemerintah perlu memastikan bahwa infrastruktur digital di Desa Kutai Lama memadai, termasuk akses internet yang stabil dan perangkat teknologi yang cukup untuk mendukung penggunaan LMS. Investasi dalam infrastruktur ini akan sangat mendukung proses pembelajaran.

- b. Kebijakan Pendukung: Mengembangkan kebijakan yang mendukung transformasi digital di tingkat desa, termasuk insentif bagi aparatur desa yang aktif menggunakan LMS untuk pengembangan diri dan peningkatan kinerja.
- c. Program Pelatihan Berkelanjutan: Mengadakan program pelatihan berkelanjutan bagi aparatur desa untuk meningkatkan keterampilan digital mereka. Pelatihan ini dapat mencakup penggunaan LMS, manajemen data, dan keterampilan teknologi informasi lainnya.

2. Saran untuk Aparat Desa

- a. Aktif dalam Pembelajaran: Aparat desa diharapkan untuk lebih proaktif dalam memanfaatkan LMS sebagai sarana untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan. Mengikuti kursus dan pelatihan yang tersedia di LMS akan sangat bermanfaat.

Kolaborasi dan Berbagi Pengetahuan: Mendorong kolaborasi antar aparatur desa untuk berbagi pengalaman dan pengetahuan yang diperoleh dari LMS. Diskusi kelompok atau forum online dapat menjadi wadah yang baik untuk berbagi informasi.

Feedback dan Evaluasi: Aparat desa perlu memberikan umpan balik mengenai penggunaan LMS, termasuk tantangan yang dihadapi dan saran perbaikan. Hal ini akan membantu dalam pengembangan LMS yang lebih baik di masa depan.

Saran untuk Pelatih LMS

Materi Pembelajaran yang Relevan: Pelatih LMS harus memastikan bahwa materi yang disediakan relevan dengan kebutuhan aparatur desa dan dapat diterapkan dalam konteks pekerjaan sehari-hari mereka.

Pendekatan Interaktif: Menggunakan pendekatan pembelajaran yang interaktif dan menarik, seperti video, kuis, dan forum diskusi, untuk meningkatkan keterlibatan peserta dalam proses pembelajaran.

Monitoring dan Evaluasi: Melakukan monitoring secara berkala terhadap kemajuan peserta.



DAFTAR PUSTAKA

- Ally, M. (2004). *The theory and practice of online learning*. Canada : Athabasca University
- Anwar, K., Dkk. (2021). *Metodologi Penelitian Kajian Teoritis dan Praktis bagi Mahasiswa*. Riau: Dotplus Publisher.Direktorat Jenderal Bina Pemerintahan Desa
- Armstrong . (2014). *Armstrong's Handbook of Human Resource Management Practice*. London : Kogan Page Limited
- Badan Pusat Statistik. (2021). Statistik Desa Indonesia 2021.
- Bandura, Albert. (1971). *Social Learning Theory*, New York City: General Learning Press
- Cahyani, A., & Hidayatullah, S. (2017). *Pengembangan Sumber Daya Manusia melalui Pelatihan dan Pengembangan*. Jurnal Manajemen dan Bisnis, 13(2), 123-135.
- Davis, F. D. 1989. *Perceived Usefulness, Perceived Ease of Use, and User Acceptance of Information Technology*. MIS Quarterly. 13(3):319-340
- Garrison, D. R., & Kanuka, H. (2004). Blended learning: *Uncovering its transformative potential in higher education*. Internet and Higher Education, 7(2), 95–105
- Hendrik, H., Sari, R. P., & Wijaya, A. (2018). *Meningkatkan Literasi Digital melalui Pendidikan dan Pelatihan di Era Digital*. Jurnal Pendidikan dan Teknologi, 7(1), 1-12.
- Hernandez, A., & Wong, S. (2020). *Digital Transformation in Organizations: A Strategic Approach*. Journal of Digital Economy, 5(1), 1-15.
- Hidayat, R. (2020). *Analisis Akses Internet dalam Meningkatkan Kemandirian Belajar Peserta Didik di Era Digital*. Jurnal Pendidikan dan Teknologi, 9(2), 145-158.

Jean Piaget Dan Lev Vygotsky Serta Relevansinya Terhadap Pendidikan Islam.
Institut Agam Islam Negeri (Iain) Bengkulu.

Kartini, K., Sudirman, S., & Rahayu, Y. (2020). *Analisis Kebijakan Pemerintah dalam Mengatur Regulasi Teknologi Digital di Indonesia*. Jurnal Kebijakan Publik, 14(2), 123-140.

Kementerian Dalam Negeri. (2016). *Jumlah Penduduk dan Kepala Keluarga*. Diakses pada 27 Mei 2019.

Kementerian Dalam Negeri. (2022). Data Desa dan Kelurahan. Direktorat Jenderal Bina Pemerintahan Desa

Malcom Knoles(1980), *The Modern Practice of Adult Education: From Pedagogy to Andragogy*, Cambridge: Englewood Cliffs.

Prasetyo, (2021). *Kepercayaan Dan Kepuasan Penggunaan LMS Mahasiswa Selama Pembelajaran Daring*. Jurnal Basicedu, 5(4), 2330–2338. <https://jbasic.org/index.php/basicedu/article/view/1208>

Purwanto, P. (2020). *Pelestarian Budaya Tradisional Desa melalui Pemanfaatan Teknologi Informasi*. Jurnal Antropologi dan Studi Budaya, 8(1), 1-12.

Rochman, F., Wahyudi, A., & Sari, R. P. (2019). *Efektivitas Pelatihan Berbasis Learning Management System (LMS) dalam Meningkatkan Kompetensi Guru*. Jurnal Pendidikan dan Pembelajaran, 10(2), 123-135.

Setiawan, A. (2020). *Analisis Efektivitas Penggunaan Learning Management System (LMS) dalam Meningkatkan Hasil Belajar Mahasiswa*. Jurnal Pendidikan dan Teknologi, 9(1), 1-10

Siddiqui, S., Alam, M. S., & Khan, Z. A. (2019). *Evaluating the Impact of Technological Infrastructure on Sustainable Development*. Journal of Cleaner Production, 235, 1220-1232.

Sun, P. C., Tsai, R. J., Finger, G., Chen, Y. Y., & Yeh, D. (2016). *What drives a successful e-learning? An investigation of the critical success factors for e-learning adoption*. Journal of Educational Technology Development and Exchange, 8(1), 1-20.

Suryani, T. (2020). *Pengembangan Infrastruktur Digital untuk Meningkatkan Aksesibilitas dan Kualitas Layanan Publik*. Jurnal Teknologi Informasi dan Komunikasi, 12(1), 34-45.

Sutrisno, S. (2021). *Pengembangan Teknologi Informasi untuk Meningkatkan Efisiensi dan Efektivitas Organisasi*. Jurnal Teknologi Informasi dan Komunikasi, 10(1), 23-35

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7. Sekretariat Negara. Jakarta.

Vygotsky, L. S. (1978). *Mind in Society: The Development of Higher Psychological Processes*. Harvard University Press.

Yulianto, A. (2022). *Pengaruh Kualitas Materi dan Interaksi antara Peserta dan Instruktur terhadap Kepuasan Peserta Pelatihan Online*. Jurnal Pendidikan dan Pengembangan, 10(2), 123-140.

